



BAHASA DAN SASTRA

Tahun VII

Nomor 2

1981

Slamet Djabarudi

PERANAN MEDIA MASSA
DALAM PEMBINAAN BAHASA
INDONESIA

2
Direktorat
Kudayaan

1

ISSN 0126-1444

BAHASA DAN SASTRA

memuat masalah Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah

diterbitkan oleh :

PUSAT PEMBINAAN

DAN PENGEMBANGAN BAHASA

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Pemimpin umum

Amran Halim

Pemimpin redaksi

Abdul Latief

Dewan redaksi

Sri Timur Suratman

Harimurti Kridalaksana

H.B. Jassin

Boen S. Oemarjati

Anton M. Moeliono

A. Ikram

Sekretaris redaksi

Utjen Djusen R.

Redaksi pelaksana

Farid Hadi

Caca Sudarsa

Pelaksana

Abdul Rachman Djallil

alamat

Jalan Daksinapati Barat IV

Jakarta Timur

Kotak Pos 2625

Telepon 484564 dan 486558

Penerbitan majalah ini dibiayai Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Terbit enam nomor setahun. Redaksi menerima sumbangan karangan. Naskah naskah yang diterima akan diperiksa dan disertai bioografi singkat penulis dan sehelai foto berkilat. Redaksi menyediakan imbalan bagi naskah yang dinuat. Pemetaan suatu karangan tidak berarti bahwa redaksi menyetujui isi karangan tersebut. Setiap karangan dalam majalah ini dapat diterima oleh redaksi dan penulis dan pemimpin redaksi. Majalah ini dicetak pada tahun 1988 oleh CV Donaprim dengan menggunakan anggaran Pem-
bangunan Tahun 1981.

499-221
SLA
b.

BAHASA DAN SASTRA

Tahun VII / Nomor 2 1981

- | | | |
|-----------------------------|----|---|
| Tuty Fudensia | 2 | CERITA PENDEK POPULER DALAM DUNIA SASTRA INDONESIA. |
| Henny Th. Lomban
Ticoalu | 8 | INTERFERENSI LEKSIKAL BAHASA MELAYU MANADO PADA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA OLEH PEJABAT DAN AGEN MEDIA MASSA DI SULAWESI UTARA *). |
| Slamet Djabarudi | 29 | PERANAN MEDIA MASSA DALAM PEMBINAAN BAHASA INDONESIA. |
| J.D. Sunardi | 39 | MEMBEDAKAN ADALAH DAN MERUPAKAN DALAM KALIMAT EKUASIONAL. |

H A D I A H

PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

CERITA PENDEK POPULER DALAM DUNIA SASTRA INDONESIA

Tuty Fudensia

1. Istilah Fiksi Populer

Di Indonesia fiksi populer sering disebut fiksi "pop", "novel pop", atau "sastra pop". Tulisan ini sengaja memakai istilah fiksi populer untuk membedakannya dari "fiksi pop". Untuk sampai pada pengertian fiksi populer itu kita melihat dulu pengertian seni populer (*popular art*) seperti yang diberikan oleh Abraham Kaplan (1967:316-8).

Dikatakan oleh Kaplan bahwa seni populer bukanlah seni pop seperti yang antara lain tampak dalam seni rongsokan (*junk art*), yakni seni yang memanfaatkan barang-barang rongsokan sebagai media ekspresinya. Seni pop merupakan usaha pembangkangan terhadap nilai-nilai artistik yang sudah ada, sedangkan seni populer sama sekali tidak mengandung usaha pembangkangan tersebut. Seni populer bukan pula berarti seni yang buruk. Mungkin seni populer buruk, tetapi seni yang buruk belum tentu merupakan seni populer. Ukuran seni populer bukanlah pada ketidakmampuannya untuk memenuhi tuntutan kritik. Seni populer bukan seni minor atau seni kelas dua. Masing-masing karya seni itu dapat saja merupakan hasil yang bagus dalam bidangnya masing-masing. Yang membedakan seni populer dari seni yang lain itu ialah macam cita rasa yang dilayaninya. Seni populer boleh saja disebut seni menengah, dan biasa terdapat dalam majalah hiburan atau keluarga. Seni ini timbul sebagai akibat dari teknologi modern yang menyebabkan majunya penerbitan, kapitalisme yang mengakibatkan kesusastran dianggap sebagai barang komoditi, dan demokrasi yang mementingkan selera pembaca terbanyak. Seni populer juga tidak bersangkutan dengan penurunan cita rasa masyarakat, tetapi dengan belum dewasanya cita rasa dan kurangnya pengalaman estetis masyarakat.

Kaplan, selanjutnya, menjelaskan mengenai ciri-ciri seni populer (1967: 319-42). Sering dikatakan bahwa ciri utama seni populer terletak pada kesederhanaan bentuknya. Ia tidak menyetujui pendapat itu. Sebab, kalau kesederhanaan dijadikan ciri seni populer, seni kelas tinggi pun memiliki ciri seperti di atas. Ciri yang pertama ini yang dilihat dari segi bentuk adalah stereotip. Ciri ini dapat dilihat, misalnya pada tokoh-tokoh fiksi populer. Tokoh stereotip adalah tokoh yang memiliki sifat atau watak yang dianggap secara umum dimiliki oleh tokoh itu. Jadi, tokoh stereotip ibu tiri, misalnya, adalah tokoh yang memiliki sifat atau watak yang dianggap dimiliki oleh ibu tiri. Tokoh stereotip dapat ditemukan dalam dunia kenyataan atau dunia di luar karya itu. Penyederhanaan seperti yang terdapat dalam seni populer berarti bahwa seni populer hanya membatasi diri pada segala sesuatu yang sudah kita pahami dan kita kenal. Shaw (1972:356-7) mengatakan bahwa stereotip artinya suatu bentuk yang sudah pasti. Dalam sastra populer, stereotip dapat mengacu pada suatu klise, tokoh cetakan, atau kebiasaan yang sudah pasti dan dipegang teguh. Alur yang disusun berdasarkan sebuah formula yang sudah pasti merupakan stereotip. Stereotip dapat dikenakan pada unsur apa pun di dalam sastra populer yang dianggap sudah pasti dan dipegang teguh.

Ciri kedua adalah sistem bintang. Dalam karya populer selalu ada unsur tertentu yang ditonjolkan dan dipakai sebagai pendukung makna, sedangkan unsur-unsur lain tidak digarap dengan semestinya.

Seni populer dikatakan semacam kepala berita di dalam koran. Kepala berita merupakan pernyataan yang meringkas keseluruhan isi berita. Biasanya cukup dengan membaca kepala beritanya saja, pembaca sudah dapat menyimpulkan apa yang diberitakan dalam koran sehingga analisis lebih lanjut tidak diperlukan lagi.

Ciri selanjutnya yang dikemukakan adalah penghormatan makna ganda. Untuk karya yang sama, misalnya, pembaca akan memperoleh makna yang sama seperti pembaca lainnya. Menurut Kaplan, makna ganda membuat orang tidak tenteram, sedangkan karya fiksi populer menyediakan rasa aman bagi pembacanya.

Ciri lain ditinjau dari segi perasaan, yaitu adanya sentimentalitas yang terdapat dalam seni populer. Sentimentalitas itu bukan berarti menimbulkan perasaan, tetapi karena menimbulkan begitu banyak perasaan yang berlebihan untuk dapat dikuasai oleh khalayaknya.

Fiksi adalah cabang seni yang mendapat banyak perhatian dalam karya Kaplan di atas. Karena itu, teori tentang seni populer dari Kaplan dipakai sebagai dasar analisis.

2. Perkembangan Cerita Pendek

Sumardjo (1974a:5) mengatakan bahwa cerpen Indonesia timbul setelah bentuk roman atau novel berkembang, yaitu pada tahun 1936 ketika Balai Pustaka menerbitkan *Teman Duduk* M. Kasim. Berkembangnya cerpen di sini melalui majalah, seperti *Panji Pustaka*, *Panca Raya*, dan *Pujangga Baru*. Pada masa-masa itu cerpen tidak dapat dikatakan berkembang dengan baik karena masih ada anggapan bahwa seseorang belum dianggap sebagai pengarang bila hanya menulis cerpen. Dapat dikatakan bahwa cerpen hanya merupakan karya pendahuluan saja sebelum seseorang dianggap sebagai pengarang. Walaupun sebenarnya sudah ditulis sejak tahun 30-an, Sumardjo menjelaskan lebih lanjut bahwa cerpen belum mendapatkan perhatian yang baik pada masa itu.

Barulah pada zaman Jepang, cerpen mendapat perhatian khusus. Chin (1975:15-6, 142) mengatakan bahwa cerpen tumbuh subur pada zaman Jepang karena cerpen merupakan bentuk yang cocok dengan situasi waktu itu, yaitu sebagai alat propaganda Jepang. Waktu itu orang tidak mempunyai waktu luang untuk membaca karya yang panjang seperti roman. Di samping itu, pihak pemerintah banyak membuat propaganda untuk menarik minat rakyat agar membantu Jepang. Bentuk yang cocok untuk ini adalah bentuk cerpen. Kepadatan dan keringkasannya yang terkandung di dalamnya memudahkan pembaca untuk menemukan pesan yang sebenarnya diinginkan oleh pemerintah Jepang melalui pengarangnya. Peranan majalah, misalnya *Jawa Baru*, turut menunjang perkembangan cerpen. Pada masa itu yang diutamakan adalah karya yang dapat membimbing rakyat dan berisi semboyan-semboyan untuk kemakmuran bersama. Karya yang berisi kebimbangan dan keraguan tentang kemakmuran bersama harus dijauhkan karena dianggap membahayakan (Jassin, 1975:9).

Selain peranan majalah dan surat kabar yang menyediakan ruangan khusus untuk cerpen, pengaruh sayembara mengarang cerpen pun turut memajukan penulisan cerpen kita. Ada beberapa sayembara pada masa Jepang, antara lain pada tahun 1943 yang diadakan oleh majalah *Asia Raya* dan *Jawa Shinbun* 'Surat Kabar Jawa'. Kemudian tahun 1944 majalah *Jawa Baru* pun mengadakan sayembara serupa. Ukuran yang dipakai dalam setiap penilaian sayembara itu berbeda-beda, tergantung pada jenis majalahnya; majalah *Jawa Baru*, misalnya, mengutamakan unsur propaganda, sedangkan majalah *Asia Raya* mementingkan unsur hiburan.

Perkembangan selanjutnya kira-kira tahun 1945-66 digambarkan oleh Chung (1971:16-7, 20-4) sebagai berikut. Pada tahun 1945-53 ada usaha dari beberapa penerbit, seperti Balai Pustaka dan Gapura, untuk menerbitkan kumpulan cerpen. Majalah-majalah yang terbit pada masa Jepang dan per-

mulaan masa revolusi tidak terbit lagi. Pada tahun-tahun sebelum 1955, cerpen dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar. Pada bulan Juli 1953 terbit majalah *Kisah*. Majalah ini memegang peranan penting dan memberikan sumbangan yang besar artinya dalam kesusasteraan Indonesia modern, khususnya dalam hal perkembangan cerpen. Puncak perkembangan cerpen Indonesia dapat dikatakan tercapai pada tahun 1955, melalui majalah-majalah seperti *Kisah*, *Seni*, *Mimbar Indonesia*, *Zenith*, *Indonesia*, *Budaya*, *Cerita*, *Siasat*, *Gelora*, dan *Prosa*. Selain itu, terbit juga majalah-majalah yang bersifat umum yang memuat karya sastra. Oleh karena itu, dikenal sebutan *sastra majalah* pada waktu itu. Pada tahun 1961, Jassin menghidupkan majalah *Sastra*. Majalah *Sastra* ini memperhatikan juga perkembangan cerpen dengan menyediakan ruangan khusus untuk cerpen. Majalah *Sastra* rupanya tidak berumur panjang. Kemudian terbitlah majalah-majalah baru, seperti *Budaya Jaya* dan *Horison*. Pada tahun 1967 majalah *Sastra* terbit kembali.

Majalah-majalah yang telah dikemukakan di atas dikenal sebagai majalah yang menyajikan karya fiksi kelas elit, kelas tinggi (*highbrow*) atau karya yang dianggap "sastra". Cerpen-cerpen yang dimuat di dalamnya pun merupakan cerpen yang dianggap bermutu tinggi.

Bagaimanakah cerpen populer dalam perkembangannya? Kita belum mengetahui dengan pasti kapanakah yang disebut cerpen populer itu mulai ada. Belum ada tulisan yang membahas hal ini. Akan tetapi, mulai tahun 50-an kita dapat melihat perkembangan cerpen populer itu. Tulisan ini tidak membahas cerpen populer sebelum tahun 50-an. Pada tahun 50-an cerpen populer mulai terlihat mantap perkembangannya dalam dunia kesusasteraan kita. Pada masa-masa itu terbit majalah-majalah seperti *Pusparagam*, *Cinta*, *Roman*, *Purnama*, dan *Gembira* yang menyediakan ruangan khusus untuk cerpen. Kemudian, pada tahun 60-an terbit pula majalah-majalah hiburan seperti *Varia*, *Varia Nada*, *Vista*, *Detektif Romantika*, dan *Selecta*. Tahun 70-an muncul majalah-majalah seperti *Femina*, *Kartini*, *Keluarga*, *Gadis*, *Puteri*, *Putra*, *Lelaki*, dan *Hai*. Majalah-majalah itu semuanya menyediakan ruangan khusus untuk cerpen, jadi dapat dikatakan bahwa cerpen sudah banyak mendapat perhatian. Cerpen populer rupanya sudah merupakan syarat mutlak bagi setiap majalah, terutama majalah hiburan (Damono, 1975; 291 – 2). Dengan harga yang relatif cukup mahal dan dengan artikel yang ditujukan bagi pembaca yang berasal dari kalangan menengah atas, majalah-majalah itu sangat laku, sedangkan majalah-majalah seperti *Basis*, *Horison*, dan *Budaya Jaya* sukar mendapat pasaran, bahkan sering pula orang tidak mengenalnya. Majalah hiburan seperti *Femina* turut menunjang perkembangan cerpen. Majalah ini, selain menyediakan ruangan khusus untuk cerpen, juga menyelenggarakan sayembara mengarang cerpen, dan menerbitkan album cerpen. Dari keterangan itu, *Femina* dapat dikatakan berhasil dalam usahanya memasarkan cerpen.

Apa fungsi cerpen populer itu? Wellek (1963: 29) mengatakan bahwa jenis dan fungsi sastra berhubungan satu sama lain. Keduanya tidak dapat terpisahkan begitu saja. Jadi, fungsi sastra tergantung pada jenis atau macamnya. Fungsi karya sastra atau karya kelas tinggi adalah untuk memberikan sesuatu kepada pembacanya untuk dipikirkan, sedangkan fungsi fiksi populer terutama untuk memberikan hiburan kepada pembacanya.

Pembicaraan tentang cerpen populer sama sekali tidak dapat dipisahkan dari pengertian kebudayaan populer. Lowenthal (1968: xvii) mengatakan bahwa kebudayaan populer itu sudah ada sejak dahulu, bahkan boleh dikatakan setara peradaban manusia. Jadi, cerpen populer sebagai salah satu hasil kebudayaan populer pun bukan barang baru, tetapi sudah ada sejak dulu dan terdapat di mana saja (Kaplan 1967: 319).

Di Indonesia, fiksi populer sebenarnya sudah ada sejak zaman Balai Pustaka. Balai Pustaka yang semula bernama *Bureau voor de Volkslectuur* atau yang diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Inggris menjadi *The Bureau of Popular Literature of Netherlands India* dapat diartikan secara harafiah dengan nama Biro Bacaan Rakyat Hindia Belanda. Dari namanya terlihat bahwa badan ini bermaksud untuk menyajikan bacaan yang dapat dimengerti oleh kebanyakan rakyat kita. Dalam buku *Balai Pustaka Sewajarnya 1908–1942* (1948: 3) disebutkan buku-buku yang disajikan oleh badan itu. Ada tiga seri yang disajikannya, yaitu: seri A, bacaan anak-anak; seri B, bacaan untuk penghibur dan penambah pengetahuan bagi orang dewasa dalam bahasa daerah; dan seri C, bacaan yang sama dengan seri B, tetapi di dalam bahasa Melayu. Dari ketiga seri itu, seri B-lah yang diutamakan.

Sebelum Balai Pustaka ada, sudah ada kegiatan penerbitan hasil sastra Indonesia Cina yang ditulis dalam bahasa Melayu Pasar (Nio, 1962: 13). Sastra ini ditulis oleh orang-orang Cina peranakan. Mereka, umumnya, sudah tidak mahir lagi menggunakan bahasa asli mereka, tetapi mereka tidak begitu menguasai bahasa Indonesia/Melayu Tinggi. Menurut Nio, sastra Cina ini berakhir pada masa tumbangunya pemerintahan Belanda di Indonesia tahun 1942.

Sejak awal fiksi populer dipersiapkan untuk kepentingan pembacanya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Sistem demokrasi — yang diharamkan oleh fiksi kelas tinggi — dipakai dalam fiksi populer. Selera atau keinginan pembaca lebih diperhitungkan, sehingga anasir cerita yang seharusnya dipertahankan keutuhan dan kerja samanya seringkali dikorbankan demi memenuhi selera pembaca itu. Cerpen populer ada untuk dijual, dan tidak terpisah dari kepentingan dagang (Sumardjo, 1977: 33). Pengarang cerpen populer dapat didikte atau diarahkan sesuai dengan selera pembelinya. Penerbit dapat mengarahkan calon pembeli/pembaca ke selera tertentu (Damono, 1979: 5). Sekarang ini, kelihatannya kehidupan mahasis-

wa, kampus, dan lingkungan sosialnya sedang digemari. Idola remaja putri kini adalah seorang aktivis kampus atau OSIS, dan sekaligus juga seorang pemuda tampan dan pandai, sedangkan idola remaja putra adalah seorang gadis yang manis atau menjadi primadona di lingkungannya, cukup pandai, modern, tetapi masih memegang norma-norma timur. Selain lingkungan remaja seperti di atas, lingkungan rumah tangga dan permasalahannya pun mendapatkan perhatian dari kalangan pembacanya, misalnya pembaca *Femina*. Mereka mempunyai selera sendiri. Tipe suami yang ideal bagi mereka adalah orang yang sukses dalam kariernya, penuh toleransi terhadap istrinya, dan tentu saja sangat mencintai keluarganya. Dalam pada itu, tokoh istri yang ideal adalah seorang wanita yang cukup manis, cekatan, dan pandai mengatur kehidupan rumah tangganya di samping sukses menjalankan kariernya. Tokoh-tokoh semacam ini tampil dalam kebanyakan cerpen-cerpen yang disajikan *Femina* dan majalah lain yang sejenis.

Banyaknya cerpen populer yang beredar akhir-akhir ini disertai pula oleh perkembangan jumlah penulis baru yang muncul. Bacaan yang dihasilkan itu dimaksudkan untuk mengisi waktu luang dan tujuannya terutama untuk menghibur.

DAFTAR BACAAN

- Chin Yook Chin. 1975. "Cerpren Indonesia pada Zaman Jepang (Maret 1942 - Agustus 1945): Suatu Tinjauan Ekstrinsik". Skripsi Sarjana Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jakarta: FSUI
- Chung Yung Lim. 1971. "Pengarang Wanita Indonesia dan Masyarakatnya". Skripsi Sarjana Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jakarta: FSUI.
- Damono, Sapardi Djoko. 1979. "Kenyataan, Dugaan, dan Harapan". Tentang Perkembangan Sastra Kita Akhir-akhir Ini". *Prisma*. Nomor IV.
- Jassin, HB. 1975. *Kesusastraan Indonesia di Masa Jepang*. Cetakan IV. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kaplan, Abraham. 1967. "The Aesthetics of the Populer Arts" dalam Irving Deer dan Harriet A. Deer. Redalgsi *The Populer Arts: A Critical Reader*.
- Lowenthal, Leo. 1968. *Literature, Popular Culture, and Society*. Palo Alto: Pacific Books.
- Nio Yoe Lan. 1962. *Sastra Indonesia-Tionghoa*. Jakarta: Gunung Agung.
- Shaw, Harry. 1972. *Dictionary of Literature Terms*. Taronto: Mc Graw-Hill.
- Sumardjo, Jakob. 1974. "Anatomi Ceritera Pendek". *Pikiran Rakyat*, 19-9:5.
- Sumardjo, Jakob. 1977. "Novel-novel Populer Indonesia". *Prisma*. Nomor VI.
- Wellek, Rene dan Austin Warren. 1963. *Theory of Literature*. Cetakan III. England: Pinguin Books.

INTERFERENSI LEKSIKAL BAHASA MALAYU MANADO PADA PENGUNAAN BAHASA INDONESIA OLEH PEJABAT DAN AGEN MEDIA MASSA DI SULAWESI UTARA*)

Henny Th. Lomban Ticoalu

1. Pendahuluan

Bahasa Malayu Manado telah dipakai oleh penduduk Manado yang terdiri dari berbagai kelompok etnis asal Sulawesi Utara dan para pendatang suku bangsa lain yang berdomisili di ibu kota Propinsi Sulawesi Utara, Manado, sejak beberapa abad yang lalu.

Sungguhpun beberapa kelompok etnis Sulawesi Utara seperti Minahasa, Gorontalo, Sangir Talaud, dan Bolaang Mangondow masih mempergunakan bahasa ibu antaranggota kelompok etnisnya masing-masing, bahasa Malayu Manado itu dipergunakan secara merata dan meluas untuk kepentingan komunikasi antarteman sejawat, anggota keluarga, pembantu rumah, pedagang, bahkan dengan pejabat dan petugas negara dan seluruh lapisan masyarakat dalam beberapa aspek kegiatan dan lingkungan tertentu di Manado. Malahan kenyataan menunjukkan bahwa bahasa Malayu Manado yang pada beberapa generasi sebelumnya berfungsi sebagai *lingua franca* dan merupakan bahasa perolehan kedua dari penduduk Manado, kini telah menjadi bahasa pertama dari sebagian besar penduduk, terutama anak-anak yang dilahirkan di Manado.

Dengan adanya penentuan bahasa persatuan nasional, yaitu bahasa Indonesia yang telah dihayati sejak 1928 dan perumusannya dituangkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36, maka bahasa Indonesia sesuai dengan fungsi dan kedudukannya menempati beberapa lingkungan pemakaian tertentu, sedangkan bahasa Malayu Manado tetap dipakai berdampingan dengan bahasa etnis. Jadi, ketiga-tiganya dipakai dalam aspek kegiatan dan lingkungan yang berbeda oleh individu masyarakat multilingual ini.

Bahasa Indonesia dan bahasa Malayu Manado yang berasal dari satu sumber, yaitu bahasa Malayu ternyata mempunyai banyak persamaan di samping perbedaannya dalam struktur bentuk, bunyi, leksikon, dan konstruksi kalimat. Sehubungan dengan bahasa sumber, dikemukakan dalam disertasi Husen Abas (1978:60-61) bahwa bahasa Malayu yang mulanya dipakai oleh penduduk di Kepulauan Riau dan Selat Malaka itu merupakan salah satu bahasa Austronesia yang sangat cepat diterima dan diserap oleh suku bangsa Austronesia di daerah lain karena mempunyai lebih banyak persamaan daripada perbedaan dengan bahasa suku bangsa Austronesia lainnya. Situasi inilah yang mendorong perluasan bahasa Malayu di daerah-daerah lain sehingga bahasa Malayu merupakan bahasa perhubungan atau *lingua franca* antarsuku-suku bangsa di Kepulauan Nusantara, terutama dalam domain perdagangan maritim antarpulau, sejak Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7 AD. Walaupun pada permulaannya hanya dipakai oleh 10% penduduk Indonesia, tetapi fungsinya sebagai alat perhubungan inilah yang mungkin lebih mengutamakan dasar pengangkatan bahasa Malayu sebagai bahasa persatuan nasional bangsa Indonesia. Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa negara yang berfungsi sebagai: (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, (3) alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan, (4) Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mengukuhkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia telah dilaksanakan kebijaksanaan politik bahasa nasional yang ditujukan untuk menghindari kekaburan fungsi dan kedudukan antara bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing, seperti yang ditegaskan Amran Halim (1975:20-21).

Pembedaan fungsi dan kedudukan bahasa memungkinkan mengatur masuknya unsur-unsur baru dari bahasa-bahasa lain itu sedemikian rupa sehingga hanya unsur-unsur yang benar-benar dibutuhkan untuk memperkaya bahasa Nasional kita sajalah yang kita terima. Meniadakan sama sekali masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia tidak mungkin dilakukan oleh karena adalah suatu kenyataan bahwa apabila dua bahasa atau lebih dipergunakan di dalam masyarakat yang sama, maka terjadilah apa yang disebut kontak bahasa, yang mau tidak mau mengakibatkan terjadinya hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi.

Untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dilaksanakan usaha pembakuan yang terus-menerus di bidang ejaan, istilah, dan tata bahasa.

Sementara itu, bahasa Malayu sebagai bahasa perhubungan sejak permulaan abad ke-16¹) telah dikristalisasikan dengan unsur-unsur bahasa daerah pemakai di Manado dan tetap berkembang secara alamiah, yang oleh masya-

rakat penuturnya disebut dan diidentifikasi sebagai bahasa Malayu Manado.

Bahasa Malayu Manado bila diklasifikasi menurut Stewart (dalam Joshua Fishman, 1968), jika ditinjau dari segi sifat dan pemakaiannya tergolong ke dalam *creole*, yaitu hanya memiliki vitalitas, tetapi tidak mempunyai standarisasi, otonomi, dan kesejarahan identik dengan suku. Penggolongan yang sering dipakai pada publikasi populer, yaitu dialek Manado, mungkin ditinjau dari klasifikasi genetis bahasa Malayu dan penyebarannya tetapi sesuai dengan fungsi dan kedudukan yang dirumuskan Politik Bahasa Nasional. Bahasa Malayu Manado termasuk ke dalam bahasa daerah walaupun bukan bahasa etnis.

Ditinjau dari segi struktur leksikonnya, bahasa Malayu Manado yang sudah dikodifikasikan²⁾ banyak menyerap unsur non-Malayu; namun, yang dominan adalah unsur Malayunya yang sebagian besar homofon dan homonim dengan leksim bahasa Indonesia. Persamaan unsur leksikal dalam kedua bahasa ini yang tampak lebih besar jumlahnya terdapat pada leksim yang terdiri dari morfem bebas, sedangkan pada morfem terikat sebagian dipengaruhi oleh struktur gramatikal kedua bahasa yang berbeda. Adanya persamaan dan perbedaan itu adalah karena kedua bahasa itu berasal dari satu sumber, yang kini telah berbeda kedudukan dan fungsinya sehingga mendorong kecenderungan saling mempengaruhi antara bahasa Malayu Manado dan bahasa Indonesia pada pemakai masyarakat bilingual/multilingual di Sulawesi Utara. Masalahnya sampai sejauh mana gejala saling mempengaruhi ini menimbulkan interferensi yang menurut Uriel Weinreich (1968), dapat menyebabkan penyimpangan ketidaklaziman dalam salah satu bahasa dwibahasawan?

Untuk ini telah diadakan penelitian gejala interferensi bahasa Malayu Manado pada pemakaian bahasa Indonesia untuk kepentingan pembakuan dan pengembangan bahasa nasional yang menurut Amran Halim (1975:3) dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan metoda, teknik, dan hasil yang dicapai dalam sociolinguistik.³⁾ Gejala interferensi difokuskan pada studi interferensi leksikal dalam kontak bahasa untuk mengkaji konsepsi Weinreich mengenai implikasi pergeseran makna yang ditemukan dalam unsur leksikal yang homofon dan homonim pada bahasa-bahasa yang genetis dan kultural berkerabat (Weinreich, 1968).

Berapakah luas interferensi yang dapat terjadi pada dwibahasawan/multibahasawan pejabat pemerintah dan agen media massa yang luas pengaruhnya dan besar wibawanya ketika berkomunikasi dengan menggunakan bahasa nasional pada waktu membicarakan masalah kepentingan perencanaan, pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintahan?

Metoda yang dipakai dalam penelitian ini adalah gabungan teknik pe-

ngumpulan dan analisis data ilmu sosial dan ilmu bahasa yang disebut sosiolinguistik.

Pemilihan sasaran populasi penelitian diprioritaskan kepada pejabat pemerintah karena di samping guru, alim ulama, dan kaum cendekiawan, mereka termasuk golongan pembina pendapat umum yang cepat dicontoh massa.

2. Interferensi Leksikal dan Identifikasi Pola Substitusi

Rumusan beberapa ahli bahasa seperti Haugen (1950, 271:290) Weinreich (1968), dan Mackey (1972) yang mengkaji masalah interferensi dalam kontak bahasa para dwibahasawan sebagian besar saling melengkapi; namun, terhadap beberapa aspek ada terdapat perbedaan pandangan. Ketiga ahli bahasa itu sependapat dalam hal membedakan unsur interferensi leksikal yang belum terintegrasi dan yang sudah terintegrasi (karena unsur yang sudah terintegrasi sudah merupakan peminjaman). Akan tetapi, Fishman (1972) kurang menyetujui interferensi sebagai gejala penyimpangan. Haugen (dalam Anwar S. Dil, 1968:325-329) mengusulkan hal itu sebagai pemindahan/transfer yang senada dengan pendapat Zellig Harris dalam Anwar S. Dil (1968:305). Hal yang lebih mengundang masalah baru adalah pendapat Mackey (1972) mengenai pemukiman interferensi dalam '*parole*' dan peminjaman dalam *langue*, sedangkan Weinreich menyebutkan interferensi berada dalam '*speech and language*' (*parole dan langue*). Kesulitan terjadi karena dikotomi *parole* dan *langue* kini semakin kabur dalam pandangan fungsionalis, malah dikatakan telah kehilangan potensi ilmiahnya (Frenzie, 1975:5). Kesulitan mengidentifikasi unsur pinjaman menurut Haugen adalah karena tidak dibedakan atau diperhitungkan cara pendekatan diakronis atau sinkronis terhadap masalah itu. Jadi, bagaimana mengidentifikasi interferensi dibedakan dengan peminjaman?

Menurut hemat peneliti, tinjauan pertama adalah pada latar belakang situasi pemakaian kedwibahasaan/multibahasaan yang mengadakan kontak bahasa, kemudian melihat motivasi atau sebab dalam struktur bahasa yang dikorelasikan dengan faktor-faktor luar biasa, dan yang penting adalah akibat yang ditimbulkan terhadap norma bahasa yang dipakai dalam hal ini bahasa Indonesia. Peminjaman dapat terjadi pada ekabahasawan dan biasanya disebabkan oleh kebutuhan baik dalam struktur leksikon yang belum ada padanannya dan medan diferensiasi semantik; juga oleh faktor luar biasa seperti faktor prestise.

Pengaruh unsur pinjaman pada norma bahasa dalam hal ini leksikon akan memperkaya perbendaharaan bahasa itu jika benar-benar diperlukan, tetapi sebaliknya, jika unsur-unsur itu tidak diperlukan akan menyulitkan pembakuan bahasa.

Interferensi selalu terjadi pada dwibahasawan yang membawa kedua bahasanya dalam kontak. Paksaan dari kedua sistem atau struktur bahasa yang sekaligus diketahuinya menyebabkan dwibahasawan itu mengidentifikasi bunyi, kata, atau makna dari bahasa perolehan pertama dengan menyamakannya pada bahasa perolehan kedua yang sedang dipakainya. Dalam data penelitian ini terdapat realisasi interferensi leksikal pola substitusi lebih besar jumlahnya dari pola importasi. Melihat unsur-unsur importasi dari bahasa Malayu Manado yang dipindahkan pada pemakaian bahasa Indonesia, semuanya mempunyai padanannya dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan bahwa unsur-unsur tersebut bukan unsur pinjaman karena tidak didasari oleh alasan kebutuhan (*need-filling*) pada faktor luar bahasa, yaitu adanya toleransi yang besar dari sasaran populasi akan bahasa campuran (BI dan BMW) yang dirasa lebih mempermudah hubungan pembicara dengan lawan bicara sesuai generalisasi opini wawancara terarah. Ini diperkuat oleh data penelitian yang hanya menemukan pola importasi pada wacana lisan (dalam pidato dan jawaban wawancara terarah), sedangkan pada wacana tertulis yang diketemukan hanya pola interferensi leksikal substitusi.

Identifikasi Pola Substitusi

Dikaitkan dengan hipotesis Weinreich mengenai pergeseran makna yang dapat terjadi pada dua bahasa seasal dan sekerabat, yang memiliki unsur leksikal homofon dan homonim, maka di bidang leksikal dwibahasawan mengidentifikasi leksim bahasa perolehan kedua (dalam hal ini bahasa Indonesia) yang sedang dipakainya, sama dengan makna dan urutan leksikal yang ada pada bahasa perolehan sebelumnya, yaitu Malayu Manado. Sedangkan makna dan pola urutan leksikalnya telah berbeda.

Pengaruh atau akibat yang ditimbulkan pada bahasa yang digunakannya, dalam hal ini bahasa Indonesia, adalah penyimpangan atau ketidaklaziman dalam norma leksikal yang dapat mengacaukan komunikasi, yaitu salah tafsir makna dari lawan bicara. Jadi, bukan sekedar penambahan atau pergantian unsur yang indentifikasinya lebih mudah disadari setelah melihat ketidaklaziman yang hadir (*token of interference*) pada suatu bahasa yang dipakai. Pada interferensi leksikal pola substitusi, ketidaklaziman yang hadir pada norma bahasa, sukar diidentifikasi dan dipisahkan terutama pada unsur-unsur yang homofon dan homonim yang ada pada kedua bahasa *reportoire* dwibahasawan. Jadi, faktor penyebab dalam struktur bahasa adalah kesukaran memisahkan kedua bahasa karena persamaan bunyi dan bentuk leksikon, sedangkan faktor luar bahasa yang terutama adalah tingkat pengu-

saan kedua bahasa yang berbeda dan juga didorong oleh faktor sosio-budaya yang akan dibahas dalam bab berikut.

Adapun tingkat penguasaan bahasa Indonesia yang kurang memadai dan kurangnya kesempatan dan pembiasaan menggunakan bahasa ini lebih mendorong dwibahasawan untuk tidak dapat memisahkan kedua bahasa secara sempurna. Seperti pendapat Weinreich bahwa unsur-unsur bahasa yang tidak standar lebih sering diambil/dipindahkan daripada unsur bahasa standar yang dalam fungsinya tidak mencakup ragam bahasa hari-hari. Yang sangat menarik perhatian penulis adalah meneliti masalah berikut. Apakah bahasa standar dalam hal ini bahasa Indonesia, yang dipakai sesuai dengan fungsi dan kedu-dukannya, dipakai dalam semua ragam komunikasi resmi itu lebih berpotensi untuk mengganti idiom yang bergeser daripada bahasa yang tidak standar (Weinreich, 1968:107).

Untuk itulah maka pola interferensi leksikal substitusi diutamakan dalam analisi ini.

Contoh Data Interferensi Substitusi

1. 'sudah akan' Menurut Bapak Lahay *up-grading* pamongpraja
Hum. XI/75 sudah *akan* memulainya programnya di kantor
Bupati Gorontalo.
2. 'kita' Kemudian sesudah *kita* pindah ke sekolah Malayu
R. 2016 *kita* sudah mempelajari bahasa Indonesia.
3. 'banyak-banyak' Bagi mereka *banyak-banyak* itu cuma menjadi
R. 2007 lambang.
4. 'taruh kira' Kebetulan saya suka *taruh kira* itu soal-soal demi-
R. 2005 kian.
5. 'taruh kira' Serta Presiden pakai, kita semua pakai istilah itu.
R. 2024
6. 'untuk mau' Untuk *mau* cari identitas, itulah masalahnya.
R. 1022
7. 'rupa' Rupa almarhum kalau pergi ke sana cepat menye-
R. 1006 suaikan diri.
8. 'kurang' Kadang-kadang istilah itu *kurang* diambil dari
bahasa lain.
9. 'jaga' Majalah itu *jaga* jual di stasion.
10. 'bikin biasa' Saya menganjurkan kalau di desa *bikin biasa* bicara
R. 1011 dengan bahasa daerah.

11. 'kasih masuk'
R. 2015 Dia sempat *kasih masuk* kata-kata Malayu Manado dalam nyanyian mereka.
12. 'itu' (1)
E. 2024 Itu, *itu* disebut diafragma.
13. 'itu' (2)
R. 2020 *Itu* Pamong desa itu mesti begitu.
14. 'itu dia'
R. 1014 Kira-kira dinamakan apa *itu dia*.
15. 'ini'
R. 1019 *Ini* Manado ini, dulu sebenarnya wilayah Tombulu.
16. 'baik'
Dt. Pid. Wanita cuma ada lebih 300, *baik* bukan laki-laki yang lebih.

Identifikasi Pola Substitusi

Leksim yang mengalami substitusi yang sesuai dengan konteks data adalah sebagai berikut.

- 1) Leksim yang baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Malayu Manado terdapat bunyi bentuk yang sama (homonim dan homofon), tetapi maknanya telah bergeser.

R	Bunyi dan Bentuk		Makna	
	BMM	BI	Malayu Manado	Bahasa Indonesia
2016	itu	/itu/	kata penunjuk	kata keterangan
2024	serta	/serta/	setelah	turut
1017	jaga	/jaga/	biasa	waspada
1006	kurang	/kurang/	sering	tidak cukup

- 2) Leksim dan kesatuan leksikal dalam bahasa Indonesia dan bahasa Malayu Manado yang mempunyai bentuk dan bunyi hampir serupa dan makna hampir sama, tetapi pemakaiannya dalam BI sesuai dengan konteks data kurang lazim.

R	Bentuk dan Bunyi		Pola Substitusi	Pola yang lazim
	BI	BMM	BI	BI
2007	banyak-banyak	/banya-	banyak-banyak	paling-paling
2015	rupa	banya/ /rupa/	rupa	seperti/sama halnya
Dt. Pid.	bae	/bae/	baik	syukur/untung

- 3) Leksim dan kesatuan leksikal yang dalam BI dan BMM mempunyai bentuk, bunyi yang tidak serupa, dan pemakaian pola itu dalam BI merupakan salinan/terjemahan dari pola urutan BMM.

R	Bentuk dan Bunyi		Pola Substitusi	Pola yang lazim
	BMM		BI	BI
2021 1022	somo /so:mo/ for mo /for mo/		sudah akan untuk mau	akan segera/akan untuk

- 4) Leksim dan kesatuan leksikal yang dalam BI dan BMM mempunyai bentuk dan bunyi sama, tetapi pemakaian pada BI sudah berganda.

R	Bentuk dan Bunyi		Pola Substitusi	Pola yang lazim
	BI	BMM		
2021	ini	/ini/	ini ---x---ini	(---) x ini
1019	itu	/itu/	itu ---x---itu	(---) x itu
1014	itu dia	/tudia/	---- itu dia	----itu (---)

- 5) Leksim dan kesatuan leksikal yang dalam BI dan BMM mempunyai sama bentuk, bunyi dan makna yang sama, tetapi pemakaian pada BI dianggap tidak baku.

R	Bentuk dan Bunyi		Pola Substitusi	Pola yang Standar
	BI	BMM	BI	BI
1011	bikin bisa	beking bisa	bimin bisa	membiasakan/ memperbiasakan
2015	kasih masuk	kase maso	kasih masuk	memasukkan

Dalam konteks data penelitian, interferensi terjadi karena hal-hal berikut.

- (1) Terdapatnya leksim BM dan BMM yang mempunyai sama bentuk **dan** bunyi, tetapi berbeda makna sehingga dwibahasawan menggunakan itu pada BI dengan menyamakannya dengan makna dalam BMM.

Contoh: kita; serta.

- (2) Terdapatnya leksim dan kesatuan leksikal dalam BI dan BMM yang mempunyai bentuk, bunyi, dan satu makna yang sama, tetapi dwibahasawan menggunakannya dalam BI sesuai dengan ~~poia~~ urutan leksikal BMM. Penggunaannya dalam BI menjadi berganda ~~dan~~ leksim pindahan itu dapat di-tiadakan. Contoh: itu (1); ii: itu ~~dia~~.

R. 2024. Itu, pamong desa itu mesti begitu.
'Pamong desa itu musti begitu.'

R. 1019. Ini Manado ini, dulu sebenarnya wilayah Tombulu.

R. 1014. Kira-kira dinamakan apa itu dia?
'kira-kira dinamakan apa itu?'

- (3) Terdapatnya leksim BI dan BMM yang mempunyai bentuk, bunyi, dan satu makna yang sama, tetapi dalam BMM terdapat beberapa makna yang lain sehingga dwibahasawan memakai unsur leksikal itu dengan makna khusus BMM.

Contoh: *juga; itu; kurang*.

Kata jaga dalam BI bermakna:

1. tidak tidur, bangun
2. berkawal, menunggu supaya selamat (Poerwadarminta: 392)

Dalam BMM mempunyai makna no. 2

Contoh: Sapa itu da *jaga* pa dia?
'Siapa yang menjaganya?'

Makna lain dalam BMM, yaitu 'selalu,' 'biasa,' 'setiap kali'

R. 1006 Majalah itu *jaga* jual di stasion.
'Majalah itu biasa dijual di stasiun.'

Kata *itu* pada BI bermakna sebagai kata penunjuk bagi benda (waktu, hal) yang jauh (Poerwadarminta: 390).

Dalam BMM mempunyai makna BI

Contoh: *Itu* baju sana menyala skali.
'Baju itu sangat menarik.'

Makna lain dalam BMM, yaitu menyatakan keterangan (kata keterangan) seperti 'yang'

Contoh: Tu kita da bilang itu so butul kwaq.

'Yang saya katakan itu benar adanya.'

R. 2024. Itu, *itu* disebut diafragma.

Itu yang disebut diafragma.

Kata *kurang* pada BI bermakna (1) tidak cukup, (2) untuk menyatakan bilangan sedikit, (3) tidak atau belum sama dengan yang seharusnya, (4) perbandingan, (5) sedikit, (6) sesuatu yang tidak ada, (7) tidak cukup, tidak banyak, dan (8) sesuatu yang tidak ada (belum lengkap).

Dalam BMM yang bermakna seperti BI adalah no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan no.7,

Contoh: Tu aer di parigi so *kurang*.

'Air di perigi sudah *kurang*.'

Tu anak tu dia so jadi *kurang ajar*.

'Anak itu sudah kurang ajar.'

Makna lain dalam BMM, yaitu 'sering' terus-terusan.

R. 1006. Kadang-kadang istilah itu *kurang* diambil dari bahasa lain.

'Kadang-kadang istilah itu sering diambil dari bahasa lain.'

- (4) Terdapatnya kesatuan leksikal yang mempunyai bentuk dan bunyi yang *tidak serupa*, tetapi dalam pemakaian BI merupakan salinan/terjemahan dari pola kesatuan leksikal BMM dengan pembagian dan urutan seperti pola leksim BMM.

Contoh: *sudah akan; untuk mau*. Dalam BI kesatuan leksikal *sudah akan* kurang lazim urutannya dalam konteks secara terpisah, kata *sudah* bermakna (1) selesai, (2) habis, (3) telah lalu, (4) telah (menyatakan perbuatan telah jadi), (5) memang demikian (Poerwadarminta: 1972). Kata *akan* pada BI bermakna: (1) kata perangkai untuk menghubungkan kata kerja dan sebagainya, (2) mengenai, (3) untuk, (4) untuk menyatakan sesuatu yang hendak terjadi, hendak.

Dalam BMM kesatuan leksikal 'somo' menyatakan sesuatu yang akan dilaksanakan segera (inchoatif).

Contoh: Kita *somo pulang*.

'Saya akan segera pergi.'

R. um. XI/75. Menurut Bapak Lahay *upgrading* pamongpraja gelombang V tahun 1975 *sudah akan* memulakan akan segera

Bentuk *untuk umum* dalam BI kesatuan leksikal kurang lazim urutannya.

Secara terpisah kata *untuk* bermakna: (1) bagian, (2) disediakan, (3) digunakan, (4) bermaksud; 'mau' bermakna: (1) sungguh, (2) hendak, (3) akan, (4) kehendak/maksud.

Dalam BMM kata *formo* menyatakan 'akan', 'untuk'

Contoh: kita da perlu doi formo bayar SPP

'Saya perlu uang untuk membayar SPP.'

- (5) Terdapatnya leksim dan kesatuan leksikal dalam BI dan BMM yang bentuk serupa dan bunyi hampir sama serta medan makna yang sama, tetapi unsur-unsur BMM sudah mengalami perluasan semantik sehingga dwibahasawan menggunakannya dalam BI.

Contoh: *banyak-banyak; taruh kira; baik.*

R. 2007. Terdapatnya bagi mereka *banyak-banyak* itu cuma menjadi 'paling-paling' lambang.

lambang.

R. 1022. *Rupa* almarhum, kalau pergi ke sama cepat menyesuaikan diri. 'seperti'

Dt. Pid. Wanita cuma ada lebih 300, *baik* bukan laki-laki yang lebih. 'syukur'

- (6) Terdapatnya kesatuan leksikal dan leksim dalam BI dan BMM yang mempunyai sama bentuk, bunyi yang hampir serupa, dan makna yang sama, tetapi penggunaan pola leksikal itu pada BI dianggap nonstandar/tidak baku pada masa sekarang karena pada BMM hanya terdapat pola kesatuan leksikal pada morfem-morfem yang tidak mengenal imbuhan dengan makna gramatikal yang mendukung makna referensial unsur leksikal tersebut, maka penyusun menggolongkannya ke dalam interferensi leksikal. Pemakaian pada BI yang dianjurkan adalah konstruksi sintetis melalui imbuhan pada kata dasar, sedangkan yang analitis dianggap nonstandar. Kata *kasih* sebagai leksim yang merupakan morfem bebas bermakna: (1) berasa atau perasaan sayang, (2) memberi, (3) membiarkan supaya. Dalam BMM *kasih/kase* bermakna seperti yang tertulis pada bagian 2 dan 3 dan tidak mengenal makna no. 1. Dalam konteks data bentuk *kasih masuk* menyatakan 'membuat afiksasi dengan makna gramatikal yang sama dengan kata *kasih* yang tertera dalam nomor (3) adalah dengan konfiks *mekan* pada kata *masuk*.

R. Dia sempat *kasih masuk* kata-kata Malayu Manado dalam nyanyian mereka.

'Dia sempat *me-masuk-kan* kata-kata Malayu Manado dalam nyanyian mereka'

Bentuk *bikin biasa* dalam BI kata *bikin* bermakna: (1) membuat, (2) kadang-kadang; awalan *memper-* pengganti *me-*kan (Poerwadarminta:189).

Pada BMM 'bikin'/beking, bermakna seperti BI no. 1. Kesatuan leksikal 'bikin biasa' pada BI dan BMM bermakna membuat supaya.

3. Implikasi Nonlinguistik

Beberapa faktor di luar struktur bahasa atau non-linguistik yang harus dikaitkan dengan masalah interferensi yang terjadi pada masyarakat dwibahasawan menurut penjabaran Uriel Weinreich adalah sebagai berikut.

- a. Kelancaran dan keahlian seseorang mengenai bahasa secara umum dan ke-sanggupannya memisahkan kedua bahasa itu masing-masing;
- b. Keahlian dalam bahasa masing-masing secara relatif;
- c. Cara belajar setiap bahasa;
- d. Sikap terhadap masing-masing bahasa secara khusus ataupun secara kelompok;
- e. Pemilihan topik bagi orang yang diajak berbicara dalam pemakaian setiap bahasa;
- f. Jumlah/besarnya kelompok dwibahasa dan kesatuan perpecahan dalam subgrup anak kelompok yang memakai satu atau bahasa lain sebagai bahasa ibu;
- g. Fakta-fakta demografis;
- h. Hubungan sosial dan politik antara anak kelompok dan sebagainya;
- i. Kelaziman dwibahasawan akan ciri-ciri bahasa dari beberapa subgrup;
- j. Sikap bersama terhadap masing-masing bahasa baik bahasa asli ataupun yang berstatus imigrasi;
- k. Sikap terhadap kebudayaan masing-masing kelompok masyarakat;
- l. Sikap terhadap kedwibahasaan;
- m. Toleransi dan ketidaktoleransian terhadap bahasa campuran dan pemakaian bahasa tuturan yang tidak lazim/salah; dan
- n. Hubungan antara kelompok bilingual dan masing-masing dari dua kelompok bahasa yang berada dalam lokasi perbatasan (Weinreich, 1968: 3-4).

Di samping itu, perlu ditinjau fungsi dan kedudukan bahasa-bahasa dalam kelompok masyarakat bilingual dengan memperhitungkan faktor pendorong dan perintang interferensi dalam kontak bahasa seperti wilayah geografis, kelompok bahasa asli, kelompok kultural, agama, ras, seks, umur,

status sosial, jabatan, penduduk kota urban atau pinggiran, dan sebagainya. Masalah pokok yang melingkari analisis ini, yaitu: Sejauh manakah faktor luar bahasa (sosiokultural, psikologis, dan politis) merupakan latar belakang pendorong dan perintang gejala interferensi bagi dwibahasawan?

Untuk keperluan ini telah dicoba membuat generalisasi kelompok berdasarkan persentase realisasi interferensi seorang dwibahasawan dikaitkan dengan salah satu indikator nonlinguistik sesuai dengan yang dianjurkan ilmu sosial.

Kategori yang ditentukan mencakupi latar belakang sosiobudaya responden dwibahasawan/tribahasawan yang dikelompokkan sesuai dengan generalisasi jawaban wawancara terarah, yaitu meliputi perolehan bahasa pertama, kelompok etnis, pendidikan, cara belajar bahasa, status jabatan, umur, toleransi, dan sikap terhadap masing-masing bahasa dan bahasa campuran.

Wilayah geografis kelompok suku/etnis responden adalah berasal dari 4 kabupaten/daerah administratif tingkat II, yang mewakili 4 daerah budaya propinsi Sulawesi Utara, yaitu Gorontalo; Bolaang Mongondow; Minahasa; dan Sangir Talaud. Hubungan sosial politik ekonomi antara 4 kelompok etnis adalah karena mereka tinggal dalam satu wilayah propinsi dan menyebabkan mereka sering berkumpul dan menetap di ibu kota Propinsi Sulut Manado, yang menjadi sasaran lokasi penelitian ini.

Pemilihan responden kantor gubernur tingkat propinsi dan kantor wilayah penerangan tingkat propinsi sebagai sasaran populasi adalah melihat volume subkelompok etnis yang jumlahnya seimbang dan dianggap representatif mewakili penentuan sampel pilihan. Adanya toleransi yang sama dari wakil-wakil kelompok etnis tersebut terhadap bahasa Malayu Manado untuk keperluan komunikasi intim dan informal (sesuai dengan fungsi dan kedudukannya) pada domain-domain tertentu merupakan dasar penyeragaman perlakuan untuk meneliti gejala interferensi dalam kontak bahasa dwibahasawan/tribahasawan di Manado.

Melalui penerapan beberapa teknik pengumpulan data dan analisis data ilmu sosial, seperti pengamatan, wawancara terarah, daftar pertanyaan langsung, dan ilmu statistik telah dapat dilaksanakan pengukuran korelasi luasnya interferensi dwibahasawan yang disebabkan faktor struktur bahasa dengan dorongan atau rintangan faktor luar bahasa. Implikasi kecenderungan dapat dilihat dalam interferensi tabel-tabel seperti di bawah ini.

TABEL I
NILAI TENGAH INTERFERENSI DARI 46 RESPONDEN
KANTOR PENERANGAN DAN KANTOR GUBERNURAN

Kantor Penerangan		Kantor Gubernur		Total N
%	N	%	N	
3,3	23	2,3	23	46

Tampak pada tabel di atas besar jumlah nilai tengah interferensi menunjukkan angka yang sama antara pejabat/petugas kantor gubernur dan pejabat/petugas penerangan yaitu dengan jumlah (N) sama dan terdiri dari kelompok etnis, perolehan bahasa, umur, dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

Gejala interferensi dilihat dari lingkungan jawatan adalah sama; pejabat dan petugasnya secara merata cenderung menghasilkan jumlah interferensi yang sama. Kedua jawatan/instansi tersebut, tentu mempunyai pejabat dan petugas yang banyak berkesempatan untuk berkomunikasi dengan masyarakat, baik dalam medium tertulis maupun medium lisan, dan dalam gejala interferensi akibat kontak bahasa realisasi mean interferensi dari pejabat/petugas dalam jumlah (N) kurang lebih sama.

TABEL II
NILAI TENGAH INTERFERENSI SESUAI DENGAN
TINGKAT PENDIDIKAN

Kantor Penerangan			Kantor Gubernur			
Tingkat Pendidikan	%	N	%	N	Total%	Total N
Nonakademis	3,4	19	2,9	7	3,2	26
Akademis	3	4	2,9	16	2,9	20
		23		23		46

Tingkat pendidikan hanya dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok nonakademis dan kelompok akademis. Dari tabel di atas terdapat kecenderungan bahwa jumlah interferensi lebih besar terjadi pada petugas nonakademis daripada yang akademis (identitas B.A., + Drs.). Hal ini mungkin disebabkan materi dan kesempatan lebih lama belajar dalam pendidikan akademis sehingga lebih memantapkan penguasaan bahasa Indonesia dan mengakibatkan bahwa kelompok penutur tersebut lebih dapat memisahkan kedua bahasa itu. Setidak-tidaknya kenyataan itu membenarkan pernyataan Weinreich:

"For the purpose of understanding and predicting language influences the fact that one of the languages is used in the education system, if any is therefore of great importance what the school achieves as a conservatory agency in language development is however not accidental but part of a broader cultural setting with its spesific prevailing attitudes on language purity."

TABEL III
NILAI TENGAH INTERFERENSI SESUAI DENGAN
KELOMPOK ETNIS

Kantor Penerangan				Kantor Gubernur		
Kelompok etnis	%	N	%	N	Total %	Total N
Minahasa	3,4	15	3,5	15	3,4	30
Gorontalo	1,7	3	3	4	2,4	7
Sangir	4,5	4	—	—	—	4
Boloaang Mongondow	4,7	1	3,2	2	3,4	3
Minahasa + Campur	—	—	2,7	2	—	2
		23		23		46

Dari tabel-di atas ternyata bahwa kecenderungan terjadi interferensi dalam ujaran *tidak* memperlihatkan perbedaan yang besar antara kelompok anak suku di Sulawesi Utara, kecuali Gorontalo sungguhpun *bahasa Malayu Manado* dipakai lebih banyak pada *kelompok suku Minahasa*.

Besarnya pengaruh bahasa Malayu Manado dalam pemakaian bahasa Indonesia pada pejabat/petugas di kantor gubernur dan kantor penerangan di Manado tidak mutlak hanya pada kelompok suku Minahasa, tetapi merata pada kelompok etnis lainnya di Sulawesi Utara. Data-data dalam tabel ini sesuai dengan data-data pengamatan sebelumnya. Jelaslah bahwa kelompok-kelompok etnis yang berasal dari Sulawesi Utara mempunyai toleransi yang merata terhadap saling pengaruh bahasa Malayu Manado dan bahasa Indonesia.

TABEL IV
NILAI TENGAH INTERFERENSI SESUAI DENGAN
PEROLEHAN BAHASA PERTAMA

Kantor Penerangan			Kantor Gubernur			
Perolehan Bahasa Pertama	%	N	%	N	Total %	Total N
Malayu Manado	4,7	4	2,3	8	3,1	12
Gorontalo	3,6	1	—	—		1
Sangir Talaud	3,9	2	—	—		2
Minahasa	4	3	4,3	2	4,1	5
Malayu lain	1,5	3	1,5	2	1,5	5
Malayu Manado + Minahasa	3,4	7	5	7	4,2	4
Bolaang Mangondow	4,7	1	3,2	2	3,7	3
Bahasa Indonesia + Bahasa Daerah setempat	0,8	2	2,3	2	1,5	4
		23		23		46

Dari tabel di atas ternyata kecenderungan interferensi tampak persentase terbanyak terjadi pada kelompok yang bahasa perolehan pertamanya, yaitu bahasa Malayu Manado bersama Minahasa (1). Perolehan bahasa pertama Malayu Manado, Gorontalo, Sangir Talaud, cenderung menunjukkan persentase yang seimbang, sedangkan perolehan bahasa pertama dalam Malayu lain (Malayu tangsi Magelang + Malang) dan kelompok yang *sudah dibekali bahasa Indonesia* ditambah bahasa daerah setempat *memperlihatkan persentase interferensi rendah*.

Hal yang menarik yang tampak dalam tabel itu adalah bahwa kelompok yang mempunyai dua perolehan bahasa sekaligus, yaitu Malayu Manado dan Minahasa cenderung mengalami interferensi lebih banyak daripada yang hanya satu. Weinreich (1968:88) mengemukakan bahwa adanya diversifikasi dialek dan adanya fungsi-fungsi bahasa yang tidak sama menyebabkan sikap tak acuh yang mendorong interferensi.

TABEL V
NILAI TENGAH INTERFERENSI SESUAI DENGAN UMUR

Kantor Penerangan				Kantor Gubernur		
Umur	%	N	%	N	Total %	Total N
21-30 tahun	4,1	1	4,7	1	4,4	2
31-40 tahun	4,8	1	3,4	9	4,1	17
41-50 tahun	2,6	10	3,3	12	3	22
51-60 tahun	2	4	1,6	1	1,9	5
		23		23		46

Dari tabel di atas ternyata bahwa kecenderungan interferensi dalam ujaran pada umur yang lebih muda persentasenya lebih besar. Jumlah interferensi jelas secara bertingkat, yaitu lebih tua usia lebih kurang terjadi interferensi. Dengan kata lain, makin tua usia terpendek makin sanggup memisahkan bahasa reportoirnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengalaman memakai BI dalam bertugas lebih banyak, sedangkan ditinjau dari latar belakang perkembangan bahasa Indonesia justru sebaliknya. Responden yang berumur 50-60 tahun kurang memperoleh dasar pelajaran BI dalam pendidikannya, sedangkan mereka yang mendapat pendidikan mulai tahun lima puluhan terutama sesudah tahun enam puluhan pengajaran BI di sekolah makin berkembang. Namun, tampak kecenderungan bahwa kesempatan dan jabatan memegang peranan dalam memperoleh penguasaan BI sehingga responden yang masih muda dan masih baru dalam jabatannya cenderung membuat interferensi lebih banyak.

4. Kesimpulan dan Saran

1) Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat dibuktikan adanya interferensi sebagai salah satu gejala saling pengaruh, yaitu dari bahasa Malayu Manado pada penggunaan bahasa Indonesia akibat kontak bahasa pada individu masyarakat multibahasawan/dwibahasawan di Sulawesi Utara.

Pergeseran makna dan urutan leksikal pada leksikon yang homonim dan homofon dalam kedua bahasa, yaitu BMM dan BI yang berkerabat dan satu sumber sesuai dengan hipotesis dapat ditemukan melalui identifikasi interferensi leksikal pola substitusi.

Interferensi leksikal terutama pola substitusi dapat mempengaruhi norma bahasa Indonesia di bidang leksikal karena penggunaannya dapat mengacaukan komunikasi dan menyebabkan salah tafsir makna. Penemuan ini menguatkan konsepsi Weinreich bahwa interferensi adalah gejala penyimpangan bahasa dan bukan sekedar penambahan atau peminjaman.

Dikaitkan dengan tujuan politik bahasa nasional antara lain usaha pembinaan, pengembangan, dan standardisasi istilah dan tatabahasa, yaitu penentuan ciri-ciri standar, maka interferensi leksikal dalam penggunaan bahasa Indonesia di Manado merupakan suatu sumbangan data.

Beberapa teknik pengumpulan data dari ilmu sosial seperti pengamatan, wawancara terarah, dan perhitungan statistik yang digabungkan pada teknik analisis bahasa cukup efektif dalam menyimpulkan dan menyarankan tentang:

- (a) implikasi faktor pendorong dan perintang interferensi leksikal dalam struktur bahasa dan luar bahasa;
- (b) luasnya kehadiran (*token*) interferensi leksikal dalam individu masyarakat dwibahasawan dalam wacana tulisan dan lisan; dan
- (c) pengaruh dalam norma bahasa dan implikasinya untuk kepentingan ilmu bahasa, perencanaan bahasa, dan komunikasi pembangunan.

2) Saran

Untuk kepentingan penguasaan dan pembinaan bahasa Indonesia khususnya bagi pejabat pemerintah sebagai agen komunikator yang berkesempatan menyebarluaskan bahasa Indonesia perlu diberikan penataran atau kursus BI, misalnya, dalam peningkatan administrasi pemerintahan atau diberikan persyaratan yang menentukan di dalam pengembangan ketenagaan. Khusus untuk komunikator media massa seperti wartawan dan penyiar lebih diintensifkan penataran bahasa Indonesia dalam penataran jurnalistik atau kursus tersendiri.

Mengingat masalah bahasa Indonesia adalah masalah kepentingan segenap lapisan masyarakat pemakainya, perlu diintensifkan pelajaran BI bukan saja pada lembaga pendidikan tetapi juga di luar lembaga pendidikan, malahan perlu dipikirkan cara-cara yang mendorong masyarakat secara merata untuk mencari kesempatan lebih banyak memakai bahasa Indonesia selain dalam forum resmi. Dalam penelitian ini dijumpai kecenderungan bahwa yang mempunyai kesempatan lebih lama dan lebih sering memakai BI lebih berhasil memisahkan BI daripada memakai bahasa daerah.

Di lain pihak dalam usaha menyempurnakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi persatuan untuk integritas nasional bangsa agar dirasa lebih

komunikatif lebih dapat menyatakan perasaan, pikiran, dan keinginan secara tepat yang melibatkan hubungan sosial budaya yang serasi oleh seluruh insan Indonesia, terasa kebutuhan untuk memperkaya bahasa Indonesia dengan unsur-unsur bahasa daerah yang intim, menyentuh perasaan, dan memperkuat hubungan terutama dalam ragam lisan.

DAFTAR BACAAN

- Abas, Husen. 1978. "Bahasa Indonesia as unifying Language of wider Communication". Disertasi Atezco Phillipina.
- Alisyahbana, S. Tadir. "Tatabahasa Baru Bahasa Indonesia. Jilid 1 dan 2". Jakarta: Dian Rakyat. 1974.
- Asmah, Haji Omar. 1975. "Perencanaan bahasa". Stensilan.
- Bachtiar, Harsya. 1975. "Pengantar sebagai suatu Metode Penelitian". Stensilan.
- Badudu, J.S. *Pelik-pelik Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Prima. 1975.
- . "Kamus Ungkapan bahasa Indonesia". Bandung: Pustaka Prima.
- Baraja, M.F. 1975. "Mencari Jalan ke Arah Pembakuan Bahasa Indonesia". Dalam majalah Pengajaran Bahasa dan Sastra. Tahun I No. 2.
- Ferguson, Charles. 1966. "On Sociolinguistically Oriented Surveys". Dalam *The Linguistic Report*.
- Fishman, Joshua. 1972. "The Sociology of Language". Dalam *Language and Social Contact* (Pier Paolo Gaglioli).
- Fokker, A.A. 1972. *Pengantar Sintaksis Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Halim, Amran. 1975. "Fungsi Politik Bahasa Nasional". Dalam *Bahasa dan Sastra*. Tahun I No. 1. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Hauges, Einar. 1950. *Problem of Bilingualism*. Dalam *Lingun* 2.
- . "The analysis of linguistic borrowing". Dalam Anwar S. Dil. Ed *The Ecology of Language* 335-339. "Linguistic and Dialinguistics". Dalam Anwar. S. Dil. *The Ecology of Language*.
- Hymes, Del.. 1975. "Mordcls of the Interaction of Language and Social Life". Stensilan.
- Ikranegara, Kay dan Sutardi, B. 1975. "Studi Bahasa dalam Konteks Sosial". Terjemahan Buku William Rabov. Stensilan.
- Keraf, Goris. 1972. *Tatabahasa Indonesia*. Flores: Nusa Indah.
- Koentjaraningrat. 1975. "Masalah Perencanaan Penelitian". Dikutip dari Mely Tan. Stensilan. "Metode wawancara". Stensilan.
- Lyon, John. 1969. "Semantics". Dalam *Introduction to theoretical Linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mackey, William. 1972. *The Description of Bilingualism*. The Hague: Mouton.
- Mees, A. 1938. *Beknopte Maleise Grammatika*. NV. G.C.T. van Dorp. Graven Hage.
- Muliono, A. "Bahasa Baku dan Bahasa Ilmiah". Stensilan.
- Munandar, A.S. 1975. "Statistika". Bahan penataran Sociolinguistik. Tugu.
- Nababan, P.W.J. 1975. "Language clasification". Stensilan.
- Poedjosudarmo, S. 1975. "Bilingualisme". Stensilan.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1966. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bagian I. II. Cetakan keempat.

Politik Bahasa Nasional "Laporan Seminar". 1975

Rusyana Rus. 1975. "Interferensi Morfologi pada penggunaan Bahasa Indonesia oleh anak-anak yang berbahasa pertama bahasa Sunda murid SD di daerah propinsi Jawa Barat". Disertasi. Bandung.

Salea, M.W. 1976. "Kamus bahasa Malayu Manado".

Samsuri. 1975. "Morfosintaksis". Sociolinguistik. Stensilan.

Verhaar, J. 1975. "Semantik". Bahan penataran Sociolinguistik Tugu.

Weinreich, V. 1968. *Language in contact*. The Hauge: Moun-ton.

PERANAN MEDIA MASSA DALAM PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

Slamet Djabarudi

Pendahuluan

Bahasa Indonesia dalam Media Massa

Sudah delapan tahun kita memakai ejaan yang disempurnakan. Akan tetapi, rasanya masih sangat banyak yang harus kita kerjakan karena masih banyak kesalahan di media massa khususnya dan di masyarakat pada umumnya. Mungkin kekurangan itu hanya karena kelalaian kita. Namun, dari pengalaman dan pengamatan selama ini, saya mempunyai cukup alasan bahwa penyebabnya ialah keterampilan dan sikap pengasuh media massa terhadap bahasa Indonesia masih kurang. Masih sedikit penerbitan yang dengan sungguh-sungguh dan berlanjut berusaha memperbaiki keterampilan teknis penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jumlahnya bisa dihitung dengan jari bahkan cukup dengan sebelah tangan.

Baik media cetak maupun media elektronik mengalami hal seperti di atas. Sering kita baca berita yang berisi kata *dirumah* yang menurut kaidah seharusnya dipisah, *di rumah*. Sebaliknya, sering kita baca *di tangkap* pada berita-berita kejahatan. Telop di TVRI sering berisi kekacauan seperti itu. Misalnya, pada siaran sore hari 24 September 1980 ada telop yang berbunyi "Burung air *didaerah* tropis".

Tata istilah yang disertai beberapa buku penjelasan terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sering tidak ditaati. Ejaan *teknik* dan *tehnik*, *sistem* dan *sistem*, *kordinasi* dan *koordinasi*, dan *frekuensi* dan *frekwensi* masih banyak menghiasi halaman media cetak.

Harus diakui bahwa banyak wartawan yang masih enggan menjenguk *Kamus Umum Bahasa Indonesia* untuk mengecek sesuatu. Hal itu menghasilkan simpang siur yang bisa terlihat di media cetak dan terdengar di media elektronik.

Tidaklah mengherankan bila pada suatu tulisan ditemukan ejakan *merubah* dan *merobah* yang seharusnya *mengubah* bila penulisnya taat pada kaidah yang sudah ditetapkan. Gejala hiperkorek, misalnya *syah* yang seharusnya *sah*, sering kita baca di koran dan kita dengar dari radio dan televisi. Bila penulisnya mau meluangkan sedikit waktu melihat kamus, niscaya kesalahan itu dapat dihindari. Ada beberapa contoh yang lebih menyedihkan. Misalnya, ada kawan yang terbiasa mengeja *refresentatif* untuk kata *representatif*. Juga ada yang selalu mengeja *jeef* untuk mobil jip. Lalu ada yang setiap kali menulis laporan yang berisi kata *kapasitas* selalu mengeja *kafasitas*. Ketiga kawan itu semuanya wartawan.

Bila ada keterampilan berbahasa dan sikap yang baik terhadap pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentu kesalahan semacam itu tidak akan terjadi berkali-kali. Namun, setiap kali mendengar ajakan "Marilah kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar", setiap kali pula saya merasa ditantang untuk berperang. Haruskah kita memerangi kesalahan yang tergolong "salah kaprah" dan berpihak kepada kaidah yang benar, tapi kurang lazim, ataukah sebaliknya?

(1) *Ejaan*. Misalnya, kita lihat kata *apotek*. Di Jakarta hanya ada satu atau dua apotek yang mengeja seperti itu. Sebagian besar memasang papan nama dengan ejaan *apotik*. Begitu juga yang terjadi di daerah-daerah. Akibatnya, ejaan *apotik* lebih sering muncul daripada *apotek*. Yang mengeja *apotek* hanya sekitar dua penerbitan yang juga berusaha tetap mengeja *atlet* meskipun lebih banyak orang yang mengejanya dengan *atlit*.

(2) *Kata*. Hampir semua orang dan media mengeja *optimis* untuk menunjuk sifat orang yang mempunyai optimisme. Hanya sedikit orang yang mengeja adjektif itu dengan *optimistis*. Oleh karena itu, ketika diadakan penerbitan ejaan di majalah *Tempo*, banyak yang terkejut. Selama itu adjektif itu di eja *optimis*. Misalnya, "Tapi di sini orang tidak optimis akan hasilnya". (*Tempo*, 5 Januari 1980).

Sejenis dengan hal itu ialah kesalahan mengeja adjektif *pesimistis*. Orang tidak ragu-ragu mengeja *realistis* tapi bila berhadapan dengan *optimistis* akan tercacau oleh ejaan *optimis*.

Suasana seperti "perang" terasa bila kita berhadapan dengan kata *rusak*. Hampir semua orang mengeja *merusak* dan hanya sedikit yang memberi akhiran-kan sehingga menjadi *merusakkan*. yang sedikit itu antara lain penulis kamus, ahli-ahli bahsa dan beberapa pengasuh media massa. Salah satu contoh pemakaian kata *merusak* terdengar di TVRI dalam siaran "Dunia dalam Berita" 23 September 1980. "Truk-truk dan kendaraan berlapis baja bergerak dalam latihan itu melalui ladang-ladang dan *merusak* tanaman serta menabrak bangunan-bangunan di kota-kota yang dilaluinya."

Melihat kamus kadang-kadang menyebabkan orang tersentak. Selama

ini kita terbiasa menulis kata *memperinci*, *pemerincian*, *diperinci*. Namun, kamus ternyata mengajak kita menuliskannya dengan *merinci*, *perincian* dan *dirinci* karena kata dasarnya ialah *rinci*.

Timbul persoalan antara yang lazim dan yang benar. Untuk mengetahui sikap berbahasa dan selanjutnya untuk menentukan langkah dalam mengeja kata itu, diadakan pemungutan suara. Ternyata 71% lebih menginginkan ejaan yang benar, sesuai dengan petunjuk kamus, dan sisanya ingin ejaan yang sudah lazim.

Sebuah contoh lagi, yaitu kata *menyolok*. Selama ini itulah ejaan yang kita pakai. Namun, menurut kaidah, seharusnya *mencolok* karena kata dasarnya *colok*. (Seperti halnya *curi-mencuri* dan *cabut-mencabut*).

Ditambah dengan tidak diindahkannya keharusan menulis huruf miring untuk kata-kata asing dalam ejaan aslinya, sedikit contoh di atas cukup menjadi alasan untuk merasa berada dalam suasana seperti "perang".

(3) *Kalimat*. Banyak contoh yang salah dalam pembuatan kalimat pada media massa. Misalnya, pada berita-berita kejahatan sering muncul kalimat pasif yang disertai kata *berhasil*. "Herry Achmat menambahkan, 19 dari 20 perampok yang *berhasil diringkus* itu residivis, bahkan ada yang baru dua hari keluar dari penjara dan ada pula yang mengaku pernah delapan kali melakukan perampokan". (*Kompas*, 19 September 1980, halaman 5). Kata-kata seperti *berhasil*, *mampu*, *sanggup*, *sengaja*, dan sebagainya cocok untuk kalimat aktif tapi tidak cocok untuk kalimat pasif. Dr. Yus Badudu dalam salah satu siaran TV mengutakan hal ini, tetapi yang melanggar kaidah itu ternyata masih cukup banyak.

Begitu kerancuan pemakaian kata *meskipun* yang digabungkan dalam satu kalimat dengan kata *tetapi*. Hampir setiap kali orang mengawali kalimat dengan *meskipun* bisa dipastikan bahwa kalimatnya akan berisi kata *tapi*. "Yayasan Teater Nasional (YTN) pun menganggap lakon ini penting, *meski* 'kurang bobot sastranya' *tapi* telah dipertunjukkan sekitar 15 ribu kali." (*Tempo*, 19 Juli 1980).

Selain berisi kesalahan seperti itu, media massa juga sering membuat kalimat tidak logis. "Janda 'N' yang berparas lumayan nampaknya telah dijadikan objek oleh kelompok pemuda dari Cimanggu, namun tidak mendapat layanan yang diharapkan, malah 'N' memberikan perhatiannya pada kelompok remaja dari Ngamprah yang kebetulan merupakan musuh bebuyutan kelompok Cimanggu." (*Merdeka*, 11 September 1980).

Penulisnya nampak kehilangan jejak sehingga pada mulanya membicarakan *janda N* terpeleset sehingga menyenggol *pemuda dari Cimanggun*.

"Setelah dilantik pekan lalu, perhatian Majelis Iran dibawa kesoal ekonomi yang memburuk." (*Tempo*, 7 Juni 1980).

Kalimat itu terasa kacau karena yang dilantik ialah *Majlis Iran*, bukan

perhatian Majlis Iran.

Mungkin melihat banyak kesalahan (yang seolah-olah benar), seorang peserta diskusi pernah bertanya dengan pertanyaan mendasar. "Kalau dalam suatu barisan hanya ada seorang yang langkahnya benar, apakah ia harus mengikuti teman-temannya yang salah langkah atau tetap berbaris dengan langkahnya yang benar?" begitu kira-kira pertanyaannya. Tapi, persoalan bahasa tidaklah sesederhana itu dan tidak seperti itu. Penilaian terhadap suatu barisan tentunya didasarkan atas kesatuan kelompok, sedangkan terhadap pemakai bahasa dilakukan dengan satuan yang lebih kecil. Di sinilah letak peranan media massa dalam pembinaan bahasa. Di sini diperlukan sikap.

Peranan Media Massa.

Sikap berbahasa merupakan bagian sangat penting dalam pembinaan bahasa. Selain itu, keterampilan teknis sangat diperlukan oleh wartawan agar bisa menjalankan fungsinya sebagai pengasuh media massa yang diharapkan, bisa menjadi unsur penunjang dalam pembinaan bahasa Indonesia.

Media massa mempunyai tugas memberikan hiburan, penerangan, dan pendidikan. Pada bagian akhir itulah peranan media massa seperti yang diharapkan pada pokok persoalan kertas kerja ini.

Syarat.

Untuk memenuhi kewajibannya menjadi salah satu unsur pembina bahasa Indonesia, seorang wartawan perlu lulus pada beberapa syarat.

Ia harus terbiasa tertib dalam berbahasa Indonesia. Artinya, ia tunduk kepada kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

Kebiasaan *teratur* dalam berbahasa perlu dimilikinya. Dengan kebiasaan itu ia bisa dengan tepat mengutarakan pikirannya lewat kalimat-kalimatnya yang logis. Kalimat-kalimat yang kacau (tidak teratur) dapat dihilangkan bila penuturnya biasa mempunyai jalan pikiran yang teratur pula.

Penutur perlu mengusahakan agar kalimatnya tidak melelahkan pembaca atau pendengarnya. Artinya, kalimat diusahakan *ringkas*. Dengan modal itu penutur tidak mudah tergelincir dan pembaca atau pendengarnya tidak lelah.

Sebuah contoh yang diambil dari *Berita Yudha* berbunyi,

"Dalam amanat tertulis Menpen Ali Murtopo yang dibacakan oleh Dirjen Penerangan Umum Drs. Djoko Kartodihardjo pada apel bendera karyawan Deppen yang berlangsung pada hari Kamis kemarin, ditegaskan bahwa petugas-petugas Deppen wajib menyebarluaskan hasil pembangunan yang telah kita capai kepada masyarakat dan rencana Pemerintah selanjutnya". (*Berita Yudha*, 18 September 1980).

Masih sering ditemukan berita dengan kalimat yang lebih panjang daripada contoh di atas. Baik untuk media cetak maupun untuk media elektronik, kalimat tersebut cukup melelahkan.

Untuk mencapai sasaran secara tepat, kalimat sebaiknya *menarik*. Dalam penyajian berita diperlukan variasi agar barang yang diujakan laku.

Dapat dibayangkan bahwa pembaca akan bosan bila ada beberapa berita yang saling berdekatan dan masing-masing diawali dengan kata yang sama. Misalnya, dua berita pada suatu harian diawali dengan kata "Ibu-ibu". Gejala seperti itu banyak ditemukan pada berita kiriman dari bagian penerangan lembaga atau instansi tertentu.

Berita dari kantor-kantor biasanya terlalu rutin, bahkan kata pertama yang dipilih juga rutin. Misalnya, kata *dalam rangka* yang sudah lama terasa menjadi semacam klise.

"Bulan Bahasa" akan diselenggarakan *dalam rangka* memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-52, dengan tema "Dengan semangat Sumpah Pemuda kita tingkatkan mutu dan disiplin penggunaan bahasa Indonesia *dalam rangka* mencerdaskan kehidupan bangsa". (*Berita Buana*, 17 September 1980). Kata *dalam rangka* dipakai sampai dua kali dan itu membuktikan bahwa ia mudah sekali disebut sehingga menimbulkan kebosanan.

Kemungkinan-kemungkinan

Untuk memerangi kesalahan-kesalahan umum, perlu dipersoalkan mungkinkah kita menang. Kemungkinan itu setelah ditemukan masih mengundang pertanyaan mungkinkah bahaya, kesalahan rutin, datang lagi. Berdasarkan atas pengalaman, saya berani menyatakan bahwa dalam perang dengan *salah kaprah* kita bisa menang. Tanpa maksud memamerkan pekerjaan, saya sampaikan kegiatan di *Tempo* sekedar untuk mendukung alasan mengapa kita bisa menang.

Lebih dari 13 bulan kami, pengasuh majalah *Tempo*, berusaha mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kebetulan tugas itu diserahkan sebagian besar kepada saya.

Tugas saya setiap minggu mengamati pemakaian bahasa di majalah *Tempo*. Segala bentuk kesalahan dikumpulkan dan kemudian dicarikan pemecahannya. Namun, karena begitu banyak kesalahan yang ditemukan, pada minggu-minggu pertama yang disoroti kesalahan yang besar-besar saja. Baru kemudian kesalahan yang lebih kecil ditanggulangi.

Hasilnya ialah setelah empat bulan boleh dikatakan tidak ada kata *merubah*, *merobah*, *dirobah* atau *dirubah* di *Tempo*. Yang muncul ialah *mengubah* dan *diubah*, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti diajarkan oleh para ahlinya.

Kami agak lambat menghilangkan kebiasaan membuat kalimat rancu sehingga sampai bulan yang lalu masih sekali-sekali ditemukan sebuah kalimat dengan kombinasi kata *meskipun* dan *tetapi*. Hanya saja patut dicatat bahwa jumlah kesalahannya mengecil karena kesadaran untuk menghindari sudah bertambah. Masing-masing wartawan selalu berusaha menulis dengan benar karena khawatir kalimatnya dijadikan contoh bentuk kesalahan bila sampai muncul di majalah.

Seandainya iklan obat batuk Konidin (*Merubah* batuk menjadi senyuman) diganti dengan ejaan yang benar (*Mengubah* batuk menjadi senyuman), makin cepatlah hasil jerih payah para ahli bahasa untuk membina bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Untuk mempercepat proses pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, wartawan mempunyai wewenang dan kesempatan. Misalnya, menyaring ucapan sumber berita dan menyesuaikannya dengan kaidah yang benar. Banyak orang yang sering tergelincir berbicara dan tugas wartawanlah menyunting kalimat sehingga rapi. Asal tidak menyangkut hal-hal yang prinsip, kesalahan kecil sumber berita harus diperbaiki wartawan. Baik pejabat maupun ahli bahasa sekalipun tidak terhindar dari berbuat salah. Bila kesalahan itu diperbaiki dan yang bersangkutan menyadari telah melakukan kesalahan, ia akan berterima kasih kepada wartawan karena "telah diselamatkan di muka umum".

Bagi orang yang kurang mengetahui kaidah bahasa Indonesia yang baik, koreksi yang dibuat oleh wartawan akan menambah pengetahuannya. Walaupun dalam tanda petik, kalimat yang dikutip dari sumber berita tidaklah harus 100% persis. Di sinilah peran wartawan.

Tepi itu hanya berlaku untuk media cetak. Pada media elektronik, yang bisa dilakukan wartawan ialah memotong bagian kalimat yang salah menurut kaidah. Itu tentu dengan catatan asal yang dipotong bukan bagian yang penting. Untuk memperjelas hal ini, kata *kita* bisa dijadikan contoh. Di daerah Jakarta dan sekitarnya *kita* sering dipakai untuk menunjuk *kami*, bahkan *saya*. Bukan hanya anak-anak sekolah, buruh pelabuhan atau mahasiswa, melainkan juga para pejabat yang mempunyai gelar kesarjanaan sering mencampur aduk *kita* dan *kami*. Untuk tertibnya, kesalahan ucapan sumber berita perlu diperbaiki.

Kemungkinan lain yang bisa dilakukan wartawan untuk mempertahankan kemurnian bahasa Indonesia ialah mengerem lagu serangan pengaruh bahasa asing. Misalnya, tentang pemakaian kata *di mana* yang sekarang sudah merasuk ke tubuh berbagai kalangan. Pelajar, mahasiswa, pengusaha, dan pejabat sering memakai kata itu yang terasa berbau asing.

"Keputusan sidang OPEC di Wina untuk menetapkan harga minyak patokan sebesar AS\$30' sebenarnya berarti menyelesaikan situasi terkatung-

katung sejak sidang OPEC di Aljazair pertengahan Juni yang lalu, dimana pada hakekatnya tidak ada ketentuan mengenai harga minyak patokan". (*Sinar Harapan*, 18 September 1980).

Dari contoh itu terlihat bahwa kata *di mana* tidak hanya menempel pada soal tempat, tapi juga waktu. Sering ditemukan kalimat yang mengandung kata *di mana* yang sebenarnya dapat diganti dengan *yang*.

Sikap Berbahasa

Setelah *syarat* dipenuhi dan *kemungkinan* dilihat ada, tinggalah *sikap* yang harus dimiliki. Bagaimana kita bersikap terhadap bahasa Indonesia sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya usaha untuk membina dan mengembangkan bahasa kita.

Sebagai unsur yang menunjang pembinaan bahasa Indonesia, media massa harus memiliki sikap yang positif. Artinya, harus selalu ditumbuhkan sikap untuk selalu berpegang teguh kepada kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. "Bahaya" yang datang dari luar bahasa Indonesia atau yang datang dari dalam sendiri, misalnya *salah kaprah*, harus ditanggulangi.

Ada sebuah contoh yang menarik. Pernah ada biro iklan yang menolak memasang iklan karena pemasang ingin mengeja *silahkan* sedangkan biro iklan menginginkan ejaan *silakan*. Usaha biro iklan yang tetap ingin mempertahankan huruf *h* pada *silahkan* dengan alasan bahwa *silahkan* lebih populer daripada *silakan*.

Dalam memakai imbuhan perlu diindahkan kaidah yang baku. Hal ini bila diabaikan, akan menyebabkan lahir ejaan kata-kata yang seolah-olah baru dan dikecualikan. Misalnya, kata-kata *mensita*, *mensejahterakan*, *mensiagakan*, dan *menseragamkan*.

Diperlukan sikap cukup selektif dalam menerima kata-kata asing. Dengan demikian, ciri bahasa Indonesia tetap dapat dipertahankan. Makin banyak kata asing yang memasuki kosa kata bahasa Indonesia, makin kurang ciri bahasa Indonesia sendiri.

Terus terang, saya sedikit cemas bahwa untuk soal sampah saja ditampikan kata asing *crash program*. Selain mengurangi ciri bahasa asli kita, kehadiran kata asing hanya menambah beban bagi pembaca yang kurang paham bahasa asing itu. Bijaksanalah bila wartawan mengindonesiakan kata-kata asing walaupun harus meletakkannya di antara tanda petik.

Sikap untuk waspada terhadap unsur asing tidak hanya mengenai ejaan, melainkan juga tentang struktur. "Dan dalam waktu tertentu efisiensi *dari-pada* Polri ditingkatkan dengan penataan kembali metode operasional dan *re-materialisasi*." (*Berita Yudha*, 19 September 1980). *Daripada* bila dihapus akan menghemat ruangan dan, yang lebih penting, akan diperoleh kalimat yang lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.

Sedikit pun tidak tersirat dalam hati saya untuk menolak unsur asing. Penyerapan unsur asing ke dalam bahasa Indonesia tetap diperlukan mengingat kemajuan di berbagai cabang ilmu pengetahuan. Hanya harus tetap diingat bahwa penyerapan itu dilakukan bila diperlukan saja.

Sering pembaca koran dan pemirsa televisi terpaksa menelan banyak akronim tanpa mengetahui artinya. Pengasuh media massa mempunyai kewajiban untuk menekan laju pertambahan akronim.

Usaha lain yang dapat dilakukan oleh media massa ialah penyediaan rubrik atau acara khusus seperti, misalnya, rubrik "Bahasa Kita" di *Kompas*. Tulisan yang dikirim pembacanya kadang-kadang tidak memecahkan persoalan, tapi cukup merangsang pembaca lain untuk berpikir.

Acara pembinaan bahasa Indonesia di TVRI patut juga dihargai. Dari televisi antara lain kami belajar. Misalnya, tentang gugus konsonan. Selama ini kami, pengasuh *Tempo*, meluluhkan gugus konsonan yang bertemu dengan awalan *me* dan *pe*. Dari kata *proses* dibentuk menjadi *memproses* dan *pemproses*. Lalu kata *kristal* di bentuk menjadi *mengkristal* dan *pengkristal*. Proses itu terjadi berdasarkan atas analogi kata *kritik* menjadi *mengkritik* seperti yang tertulis di *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Namun, dalam siaran televisi, S. Effendi mengatakan bahwa gugus konsonan tidak luluh bila bertemu dengan awalan *me*. *Kristal* menjadi *mengkristal* dan *kritik* menjadi *mengkritik*. Terpaksalah kami berputar haluan dan mengeja *memproses* dan *mengkristal*. Semoga terdapat keserasian antara *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan siaran "Pembinaan Bahasa Indonesia" yang diasuh oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Dengan demikian, kami merasa lebih mantap dalam memakai bahasa Indonesia.

Demikianlah usaha kami untuk ikut menyumbangkan sesuatu bagi pembinaan bahasa Indonesia, walaupun hanya setitik. Untuk mencapai hasil yang hanya setitik itu kadang-kadang kami terantuk batu dan ditertawakan orang.

Dalam membina bahasa Indonesia, diperlukan "stabilitas yang dinamis" seperti yang sering terdengar dalam pidato-pidato. Para pemakai bahasa, termasuk pengasuh media massa, perlu mengambil sikap seperti itu. Diperlukan ketertiban yang mengandung unsur keluwesan. Artinya, kita harus taat kepada asas-asas pokok yang sudah ditetapkan tetapi siap menerima unsur dari luar dengan sistem yang sudah ditetapkan pula.

Kesimpulan

1. Keadaan bahasa Indonesia di media massa khususnya, dan di masyarakat umumnya, masih belum sebaik yang diharapkan.

2. Media massa mempunyai peranan yang penting, yang sekaligus merupakan kewajiban, untuk ikut membina bahasa Indonesia.

3. Terdapat kemungkinan memperoleh hasil seperti yang diharapkan, apalagi bila segenap warga masyarakat memiliki sikap bahasa yang baik. Kesabaran sangat diperlukan karena pembinaan mengandung unsur-unsur pendidikan.

4. Dari para pengasuh media massa dituntut sikap berbahasa yang baik. Disiplin sangat diperlukan. Sikap yang baik, mudah-mudahan tidak dianggap berlebihan, ialah sikap untuk lebih dulu berperang mati-matian melawan ketidaktertiban dan baru menyerah bila ternyata kita kalah.

DAFTAR BACAAN

Angkatan Bersenjata. 1980. Jakarta: Yayasan Manggala Press.

Berita Buana. 1980. Jakarta: Yayasan Yudha Press.

Berita Yudha. 1980. Jakarta: Yayasan Parikesit.

Kompas. 1980. Jakarta: Yayasan Bentara Rakyat.

Merdeka. 1980. Jakarta: PT Merdeka Press.

Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1979. *Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Sinar Harapan. 1980. Jakarta: PT Sinar Kasih.

Tempo. 1980. Jakarta: PT Grafiti Pers.

MEMBEDAKAN ADALAH DAN MERUPAKAN DALAM KALIMAT EKUASIONAL

J.D. Sunardi

Pendahuluan

Meskipun kita sering menggunakan kata *adalah* dan *merupakan* dalam penuturan dan tulisan, belum tentu kita dapat menjelaskan perbedaan antara keduanya baik dalam arti maupun penggunaannya. Buku-buku tata bahasa yang ada pun rupanya belum secara tuntas membahas kedua kata itu. Tulisan berikut ini bermaksud memberikan sumbangan pikiran tentang kedua kata itu. Ini tidak berarti bahwa tulisan ini akan dapat menjawab segala permasalahan tentang kedua kata itu.

Kalimat ekuasional

Pembicaraan ini akan terbatas pada pemakaian kata *adalah* dan *merupakan* dalam kalimat ekuasional. Yang dimaksud dengan kalimat ekuasional adalah kalimat yang subjek dan predikatnya masing-masing berupa kata benda atau kata lain yang berfungsi sebagai kata benda.

- (1) a *Saya / Subono*
b *Dia / guru*
c *Itu / meja*
d *Ini / buku saya Buku saya / ini*
e *Yang saya kehendaki / lima Lima / yang saya kehendaki*

Dalam tiap kalimat pada contoh (1) a, b, c, d, dan e antara subjek dan predikat terdapat garis pemisah. Antara kedua bagian kalimat itu tidak mungkin disisipi kata *merupakan*, sedangkan penempatan kata *adalah* antara subjek dan predikat akan dirasa tidak perlu.

- (2) a *Ini (adalah / merupakan) kejutan*

- b *Ini (adalah / merupakan) suatu kejutan*
- c *Ini (adalah / merupakan) sesuatu yang mengejutkan*
- d *Yogya (adalah / merupakan) kota tujuan perjalanannya*
- e *Berita itu (adalah / merupakan) isapan jempol belaka*
- f *Sepuluh ribu rupiah itu (adalah / merupakan) modal usahanya pertama*
- g *Gunung yang tinggi dan lembah yang dalam itu (adalah / merupakan) benteng kota kelahiranku*

Pada contoh (2) a–g antara subjek dan predikat boleh digunakan kata *adalah* atau *merupakan*, tetapi boleh juga tidak. Sebagai kalimat ekuasional kalimat-kalimat (2) b, c, f dan g dapat dibalik susunan subjek dan predikat, serta di antaranya disisipkan kata *adalah*.

- (3) b *Suatu kejutan (adalah) ini*
- c *Sesuatu yang mengejutkan adalah ini*
- f *Modal usahanya pertama (adalah) sepuluh ribu rupiah itu*
- g *Benteng kota kelahiranku (adalah) gunung yang tinggi dan lembah yang dalam itu*

Kalimat-kalimat (2) a, d dan e dapat pula disusunbalikkan dengan cara yang sama, tetapi subjek yang baru harus didahului frase *Salah satu*.

- (4) a *Salah satu kejutan adalah ini*
- d *Salah satu kota tujuan perjalanannya (adalah) Yogya*
- e *Salah satu isapan jempol belaka (adalah) berita itu*

Kata *adalah* dalam kalimat (3) c dan (4) a tidak dapat dihilangkan karena tanpa kata *adalah* yang tersisa bukanlah kalimat, melainkan hanya frase.

- (5) a *Salah satu kejutan ini*
- c *Sesuatu yang mengejutkan ini*

Setelah dibicarakan kata *adalah* yang tidak perlu dipakai dalam kalimat serta kata *merupakan* yang tidak boleh dipergunakan dalam kalimat ekuasional, kemudian *merupakan* atau *adalah* yang boleh dipakai tetapi boleh juga tidak, berikut ini akan dibahas kata *adalah* atau *merupakan* yang harus dipergunakan dalam kalimat ekuasional.

- (6) a *Bahwa sebagian besar hutan kita telah gundul adalah hasil penyelidikan terakhir merupakan*
- b *Salah satu hasil penyelidikan terakhir adalah bahwa sebagian besar hutan kita telah gundul*
- c *Mencuri dan berjudi adalah dosa merupakan*
- d *Salah satu dosa adalah mencuri dan berjudi*

Kalau kita pelajari contoh (6) a, b, c, dan d, maka kita akan memahami

bahwa tanpa kata *adalah* atau *merupakan*, kalimat-kalimat itu sulit dipahami artinya, karena tanpa kata pemisah itu sulit bagi kita untuk menentukan subjek dan predikatnya. Hal ini disebabkan kalimat (6) a dan b keduanya panjang, sedangkan pada (6) c dan d tanpa kata *adalah* atau *merupakan* masing-masing tidak akan menjadi kalimat sempurna dan karena itu kabur artinya.

Dalam kalimat-kalimat (7) a, b, dan c kata *adalah* boleh dipakai boleh tidak.

- (7) a *Sukarno (adalah) Presiden Republik Indonesia*
- b *Suharto (adalah) Presiden Republik Indonesia yang kedua*
- c *Abas (adalah) orang pertama yang dapat mencapai puncak gunung itu*

Tanpa kata *adalah* kalimat-kalimat (7) a, b, dan c masing-masing masih kedengaran sebagai kalimat sempurna dan artinya dapat dimengerti. Sebaliknya dalam kalimat (8) kata *adalah* harus dipergunakan, tidak boleh ditinggalkan.

- (8) *Itu adalah apa yang dikatakan oleh pacarnya*

Tanpa kata *adalah* kalimat (8) kedengaran seperti kalimat tanya dan artinya tidak jelas benar; karena itu kata *adalah* harus ada. Kata *adalah* menjadi suatu keharusan, terlebih-lebih bila kita membuat semacam batasan atau definisi seperti:

- (9) a *Dalam ilmu kimia yang dimaksud dengan air adalah persenyawaan yang terdiri dari unsur-unsur H dan O*
- b *Yang dimaksud dengan linguistik adalah ilmu yang menyelidiki tentang bahasa*

Batasan itu dapat disederhanakan sehingga berbunyi seperti dalam (10) a dan b.

- (10) a *Air adalah persenyawaan yang terdiri dari unsur-unsur H dan O*
- b *Linguistik adalah ilmu yang menyelidiki tentang bahasa*

Kalau kalimat-kalimat bahasa Indonesia ada yang dapat disisipi kata *adalah* antara subjek dan predikat dan *adalah* itu bersifat 'optimal', maka agaknya tidak ada kalimat ekuasional yang antara subjek dan predikatnya dapat disisipi kata *merupakan* yang bersifat 'optional'; Namun, ada kata *merupakan* yang merupakan suatu keharusan, artinya ada kalimat ekuasional yang memerlukan kata *merupakan* antara subjek dan predikat.

- (11) a *Yang dicita-citakan merupakan kenyataan sekarang*
- b *Apa yang dikatakan gurunya merupakan dorongan baginya untuk bangkit dan tidak berputus asa*

Dalam kalimat-kalimat (11) a dan b kata *merupakan* tidak dapat diganti dengan kata *adalah*. Walaupun demikian kata itu dapat diganti dengan kata *menjadi* dan artinya tetap sama. Ini tidak berarti bahwa arti kata *merupakan*

selalu sama dengan arti kata *menjadi*.

Sekarang timbul pertanyaan sebagai berikut. Kalau kata *merupakan* dapat diganti dengan kata *menjadi*, bagaimana halnya dengan kata *adalah* dalam seluruh contoh kalimat dalam pembahasan kita sampai saat ini? Fungsi kata *adalah* ternyata dapat digantikan oleh kata *memang*. Kita dapat menerapkan prinsip ini pada kalimat-kalimat dalam contoh (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10) dan bahkan kata *memang* dapat disisipkan antara subjek dan predikat pada kalimat-kalimat dalam contoh (1).

Beberapa kesimpulan

Bila kita berbicara tentang kata *adalah* dan *merupakan* dalam kalimat ekuasional maka dapatlah dikemukakan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, kata *adalah* dapat diganti dengan kata *memang*, sedangkan *merupakan* dapat diganti dengan *menjadi*. Ini berarti bahwa kata *merupakan* mengandung arti perubahan, sedangkan kata *adalah* tidak.

Kedua karena itu, kalimat yang mengandung kata *adalah* dalam pembicaraan ini adalah kalimat ekuasional dalam arti yang sebenarnya. Akibatnya kalimat seperti itu dapat dibalik susunannya dengan cara seperti berikut.

- (12) a *Orang itu adalah kepala kalurahan Tegalrejo*
- b *Kepala kalurahan Tegalrejo adalah orang itu*
- c *Pak Murtaji adalah petani yang tekun*
- d *Salah satu petani yang tekun adalah Pak Murtaji*

Kalimat-kalimat yang tertera di bawah ini dapat diuji dengan cara seperti ini.

- (13) a *Yang dimaksud dengan etimologi adalah ilmu yang membicarakan asal-usul atau sejarah kata*
- b *Yang termasuk propinsi Jawa Tengah adalah bekas keresidenan Banyumas, Kedu, Surakarta, Semarang, Pati dan Pekalongan*
- c *Salah satu akibat dari apa yang dikatakannya adalah bahwa orang menjadi yakin akan kebenaran ajaran itu*
- d *Yang ditanyakan adalah Aminah*

Tentu saja dalam pengujian dengan cara susun balik ini dapat pula kita mempergunakan kata *memang* sebagai pengganti *adalah*.

Ketiga, kita mengenal kata *adalah* yang boleh dipakai, boleh tidak (optional) seperti dalam contoh (12) a, b, c, dan d dan di samping itu kita mengenal kata *adalah* yang tidak dapat tidak harus digunakan (obligatory) seperti contoh (13) a, b, c dan d. Kata *adalah* yang merupakan keharusan dipakai antara lain dalam batasan (contoh (13) a) dan dalam kalimat yang bila kata *adalah* dihilangkan, arti kalimat itu menjadi kabur atau tidak merupakan kalimat lagi (contoh (13) b, c, dan d).

Keempat, kalimat-kalimat berikut ini harus mengandung kata *merupakan* dalam bagian yang kosong.

- (14) a *Yang diinginkan oleh Amir ... kenyataan*
b *Yang dinasihatkan oleh ayahnya ... pendorong baginya untuk mencapai keberhasilan*

Alasan mengapa harus dipergunakan kata *merupakan* ialah:

- bagian yang kosong itu dapat diisi dengan kata menjadi dan artinya tetap sama;
- bila diadakan susun balik seperti tersebut dalam kesimpulan kedua, arti kalimat baru hasil susun balik itu menjadi lain sama sekali.

Kelima, kalimat-kalimat yang tertera di bawah ini dapat mengandung kata *adalah* atau *merupakan* pada bagian yang kosong.

- (15) a *Bahwa ia mendapat penghargaan dari pemerintah ... sesuatu yang tidak diharapkannya*
b *Mencela ... perbuatan yang tidak baik*
c *Kegagalan ini hendaknya ... yang pertama dan terakhir*
d *Nasihat itu ... pelajaran yang berharga*

Kata *adalah* atau *merupakan* dapat digunakan dalam kalimat (15) a, b, c dan d karena

- masing-masing dapat diuji dengan cara susun balik dan artinya tetap sama;
- kata *menjadi* dapat diisikan ke dalam bagian yang kosong dalam tiap kalimat dan tiap kalimat tetap berarti seperti hasil pengujian pertama.

Keenam, makin panjang suatu kalimat ekuasional makin perlulah penggunaan kata *adalah* atau *merupakan* dan hasilnya akan memperjelas yang mana subjek kalimat dan yang mana predikat.

Penutup

Tulisan ini berdasarkan bahan yang ditimba dan diangkat dari pengalaman penulis dalam mengajarkan Bahasa Indonesia kepada orang asing terutama orang Australia. Ini berakibat bahwa tulisan ini jauh dari sifat teoritis maupun sifat ilmiah yang mendalam. Memang pembahasannya hanya menyentuh hal-hal yang mungkin praktis dan pola-pola kalimatnya tidak begitu kompleks.

Semoga tulisan yang sederhana ini bermanfaat.

Perpustakaan
Jenderal

49